

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan bebas secara umum mengacu pada pergerakan bebas barang, jasa, tenaga kerja lintas batas negara. Perdagangan bebas menjadi tujuan utama dari adanya pembentukan perjanjian perdagangan bebas yang saat ini ramai dinegosiasikan di seluruh dunia. Dari sekian banyak model perdagangan bebas yang berjalan, terdapat transaksi perdagangan dengan model kewilayahan, dengan salah satu diantaranya yaitu *Trans-Pacific Partnership* (TPP) atau Kemitraan Trans-Pasifik. *The Trans-Pacific Partnership* (TPP) adalah perjanjian peraturan dan investasi regional yang dinegosiasikan oleh 12 negara di seluruh kawasan Asia Pasifik, yaitu Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chili, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, Amerika Serikat dan Vietnam. Perjanjian yang diusulkan tersebut memiliki garis dasar dengan nama Perjanjian Kemitraan Ekonomi Strategis Trans Pasifik atau *Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement* yang disingkat menjadi TPSEP atau P4, yang dimulai pada tahun 2005 oleh empat negara - Selandia Baru, Singapura, Brunei dan Chili, sebagai anggota pendiri (Anggarwal, 2016).

Trans-Pacific Partnership (TPP) dirancang untuk mencakup 40 persen ekonomi global dan sepertiga perdagangan global dengan tujuan utama yaitu untuk menetapkan standar baru bagi perdagangan global yang akan meningkatkan daya saing negara-negara anggota TPP dalam tingkat ekonomi global. Termasuk juga akses pasar yang kompetitif dengan berusaha menghilangkan tarif dan hambatan perdagangan dan investasi, untuk menciptakan peluang baru di kedua bidang - pekerjaan dan bisnis - dan manfaat langsung bagi konsumen (“Trans-Pacific Partnership Trade Ministers”, 2013).

Pada bulan Maret 2008, AS yang ketika itu dipimpin oleh Bush mulai mengungkapkan keinginannya untuk memasukkan bidang layanan keuangan dan investasi dalam negosiasi, wilayah yang tidak disebutkan dalam kesepakatan awal TPSEP. Hal ini ternyata berlanjut seiring dengan terpilihnya Barack Obama sebagai Presiden AS pada tahun 2009. Pada tanggal 14 November 2009, AS di bawah Pemerintahan Obama AS melanjutkan gagasan Bush kala itu, untuk kembali berkomitmen dan bergabung dengan negara-negara anggota TPP yang memiliki tujuan untuk membentuk regional yang luas dengan standar kesepakatan yang tinggi di abad ke 21 (Fergusson, McMinimy, & Williams, *The Trans-Pacific Partnership (TPP) Negotiations and Issues for Congress*, 2015).

Keinginan Obama untuk bergabung dengan TPP disampaikan dalam sebuah pernyataan yang diberikan ketika ia berada di Tokyo pada November 2009. Pernyataan itu berbunyi:

“The growth of multilateral organizations can advance the security and prosperity of this region. I know that the United States has been disengaged from these organizations in recent years. So let me be clear: those days have passed. As an Asia-Pacific nation, the United States expects to be involved in the discussions that shape the future of this region and to participate fully in appropriate organizations as they are established and evolve.”

“Pertumbuhan organisasi multilateral dapat memajukan keamanan dan kemakmuran wilayah. Saya tahu bahwa Amerika Serikat telah lepas dari organisasi-organisasi ini dalam beberapa tahun terakhir. Jadi, saya tegaskan: hari-hari tersebut telah berlalu. Sebagai negara Asia-Pasifik, Amerika Serikat mengharapkan untuk kembali terlibat dalam diskusi yang membentuk masa depan kawasan ini dan berpartisipasi sepenuhnya dalam organisasi yang sesuai sebagaimana kawasan ini terbentuk dan berkembang. (Fergusson, 2010)

Dalam pidato di atas Obama menegaskan bahwa AS akan mengambil bagian dalam negosiasi pembentukan *TPP Agreement*.

Namun, prosedur bagi AS untuk bergabung ke dalam suatu organisasi ataupun perjanjian harus dilakukan melalui persetujuan Kongres terlebih dahulu, termasuk ketika Obama memiliki gagasan untuk AS bergabung ke dalam *TPP Agreement*. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, Presiden diwajibkan untuk memberi tahu dan berkonsultasi dengan para pemimpin kongres, sebelum, selama, dan setelah kesepakatan perdagangan telah dinegosiasikan. Hal ini dilakukan karena TPP kemungkinan besar akan mempengaruhi berbagai sektor dan wilayah ekonomi AS yang berdampak langsung pada kepentingan AS dan dapat mempengaruhi bentuk dan jalur kebijakan perdagangan AS di masa yang akan datang. Presiden Obama pun secara resmi memberitahukan Kongres tentang niat Administratifnya untuk melakukan negosiasi dengan negara-negara anggota TPP pada tanggal 14 Desember 2009 (Fergusson, McMinimy, & Williams, *The Trans-Pacific Partnership (TPP) Negotiations and Issues for Congress*, 2015). Pemberitahuan tersebut dilakukan 90 hari sebelum dimulainya negosiasi dengan anggota TPP.

Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat kemudian menggariskan 30 pasal TPP yang mencakup isu perdagangan dan perdagangan, dimulai dengan perdagangan barang dan dilanjutkan dengan fasilitasi bea cukai dan perdagangan; tindakan sanitasi dan fitosanitasi; hambatan teknis untuk berdagang; solusi perdagangan; investasi; jasa; perdagangan elektronik; pengadaan pemerintah; hak milik intelektual; tenaga kerja; lingkungan hidup; dan yang akan sepenuhnya memastikan pengembangan TPP, daya saing dan inklusifitas. Ini berlanjut dengan ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan, pengecualian dan ketentuan kelembagaan (Gutu, 2016).

Dari 30 pasal yang digariskan oleh Kantor Perwakilan Dagang, AS memasukkan beberapa hal yang akan dinegosiasikan dalam pembentukan *TPP Agreement*, yaitu menegosiasikan mengenai akses pasar untuk barang, jasa, dan pertanian dengan negara-negara yang saat ini tidak memiliki *Free Trade*

Agreement (FTA) seperti Brunei, Jepang, Malaysia, Selandia Baru, dan Vietnam. Selain akses pasar bagi negara yang belum memiliki FTA, AS juga melakukan negosiasi mengenai disiplin ilmu untuk hak atas kekayaan intelektual (HAKI), perdagangan jasa, *government procurement*, investasi, peraturan asal, persaingan, tenaga kerja, dan lingkungan, di antara isu lainnya. Dalam banyak kasus, peraturan yang dinegosiasikan dimaksudkan lebih ketat daripada peraturan serupa yang ditemukan di dalam World Trade Organization (WTO). Beberapa topik, seperti perusahaan milik negara, koherensi peraturan, dan daya saing, dapat mematahkan landasan baru dalam negosiasi FTA. Karena negara-negara yang membentuk mitra negosiasi TPP mencakup negara industri maju, menengah, dan negara berkembang. Jika TPP dilaksanakan, mungkin akan melibatkan restrukturisasi dan reformasi ekonomi beberapa peserta (negara anggota TPP). Namun, kesepakatan ini juga berpotensi memacu pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia-Pasifik (Fergusson, McMinimy, & Williams, *The Trans-Pacific Partnership (TPP) Negotiations and Issues for Congress*, 2015).

Amerika Serikat di bawah pemerintahan Obama tidak ingin kehilangan kesempatan sebagai kekuatan Pasifik. AS telah mendorong untuk mengembangkan TPP sebagai kemitraan yang bertaraf tinggi melalui sebuah kesepakatan perdagangan dan memanfaatkan TPP untuk menyeimbangkan Tiongkok terutama di kawasan Asia-Pasifik, baik dari sudut pandang ekonomi maupun keamanan.

Dukungan Obama terhadap TPP semakin tinggi, ia berusaha meyakinkan Kongres dan menunjukkan optimisme bahwa TPP merupakan suatu langkah yang baik bagi AS terutama dalam bidang ekonomi. Bergabungnya AS dengan TPP dinilai akan menjadi suatu kesempatan yang baik, karena negara-negara anggota TPP merupakan mitra dagang serta relasi yang penting bagi AS. Hal ini dilihat dari relasi ekonomi AS dengan beberapa negara seperti Kanada dan Meksiko. Kedua negara ini adalah mitra dagang AS terbesar di antara negara-negara TPP lainnya dalam pengadaan barang dan investasi. Kedua negara berbagi perbatasan yang luas dengan Amerika Serikat dan

termasuk ke dalam mitra FTA AS serta tergabung dalam sebuah kesepakatan dagang bernama NAFTA. Tak hanya itu, delapan mitra TPP lainnya seperti Singapura dan Australia adalah pasar ekspor barang AS teratas dan mitra dagang dan investasi keseluruhan dengan AS, sementara Malaysia, Vietnam, dan Singapura merupakan sumber utama impor barang AS.

Tak hanya meyakinkan Kongres bahwa TPP merupakan kesempatan yang menguntungkan, Obama juga memperlihatkan dukungannya melalui tindakan agresif untuk mempromosikan TPP ke negara-negara lain di dunia. Salah satu negara yang begitu gencar di dorong Amerika Serikat untuk bergabung dengan TPP adalah Jepang. Jepang yang merupakan mitra dagang terbesar ketiga dalam sektor barang, serta mitra dagang dan investasi layanan terbesar kedua, pada awalnya belum bergabung dengan TPP kemudian memutuskan untuk bergabung pada tahun 2013. Jepang juga berusaha membantu Obama dalam mengajak negara-negara anggota ASEAN untuk bergabung dalam kerangka kerjasama TPP.

Setelah melalui proses negosiasi yang panjang antar negara anggota TPP selama kurang lebih enam tahun akhirnya ditemukan sebuah kesepakatan akhir yang disebut *TPP Agreement* (Kesepakatan TPP). Kesepakatan itu dibuat pada tanggal 5 Oktober 2015, kemudian diumumkan pada tanggal 5 November 2015, dan ditandatangani pada tanggal 4 Februari 2016 di Auckland, Selandia Baru. Para menteri perdagangan dari Amerika Serikat dan 11 negara Pasifik lainnya secara resmi menandatangani kesepakatan perdagangan regional terbesar dalam sejarah di Selandia Baru. Namun, nasib proyek ekonomi yang memerlukan tanda tangan Obama ini tertahan di Capitol Hill (Nakamura, 2016). Serangkaian proses panjang yang dilakukan oleh administratif Obama selama lebih dari enam tahun dalam meyakinkan Kongres ternyata belum menemukan titik terang. Dukungan AS dalam *TPP Agreement*, dengan turut menandatangani kesepakatan pun tidak mendapat persetujuan dari Kongres AS. Sehingga dapat dikatakan bahwa posisi AS belum resmi tergabung ke dalam *TPP Agreement*.

Tak lama setelah penandatanganan *TPP Agreement*, Amerika Serikat mengadakan pemilihan presiden baru pada akhir tahun 2016. Salah satu kandidat presiden kala itu adalah Donald J. Trump atau lebih familiar dikenal dengan Donald Trump. Sejak masa kampanye, Trump sudah mulai memperlihatkan arah dan rencana kebijakan-kebijakan yang akan ia lakukan, ketika nanti ia terpilih menjadi Presiden AS. Dari sekian banyak arah kebijakan yang disampaikan, salah satunya membahas mengenai kebijakan luar negeri Amerika Serikat untuk menarik diri dan menghentikan dukungan terhadap TPP, baik dari keanggotaan maupun kesepakatan yang telah dinegosiasikan. Hal ini juga ditegaskan oleh Trump melalui pernyataan di sosial media yang diunggah melalui akun Twitter pribadinya dengan nama pengguna *@realDonaldTrump* yang berbunyi:

"The Trans-Pacific Partnership will increase our deficits & send even more jobs overseas. This is a bad deal. Time for smart trade!"

"Kemitraan Trans-Pasifik akan meningkatkan defisit dan mengirim lebih banyak lagi pekerjaan ke luar negeri. Ini adalah transaksi yang buruk. Waktunya untuk perdagangan yang cerdas!"

Pernyataan yang diberikan oleh Trump melalui cuitan pada akun Twitter ini di posting pada tanggal 3 Juni 2015, atau ketika masa kampanye pemilihan presiden AS.

Hasil pemilihan presiden AS pada tahun 2016 menyatakan bahwa Trump berhasil memenangkan pemilihan presiden AS dengan memperoleh 306 suara, sedangkan lawannya yakni Hillary Clinton memperoleh 232 dari total suara (Presidential Election Results: Donald J. Trump Wins, 2017). Sejak itu Trump menyandang status sebagai presiden AS terpilih, yang akan menggantikan Barack Obama pada masa kepemimpinan selanjutnya.

Pada tanggal 21 November 2016, presiden terpilih Donald Trump sudah mulai menunjukkan langkah-langkah yang akan ia ambil ketika resmi menjabat sebagai presiden Amerika

Serikat. Trump kemudian mengumumkan bahwa ia berencana untuk menarik Amerika Serikat serta menghentikan dukungan terhadap TPP dan akan membatalkan keputusan TPP Obama pada hari pertamanya menjabat di *Oval Office*. "Pada perdagangan, saya akan mengeluarkan pemberitahuan tentang niat untuk menarik diri dari TPP, sebuah potensi bencana bagi negara kita. Sebaliknya, kita akan menegosiasikan kesepakatan perdagangan bilateral yang adil yang membawa lapangan kerja dan industri kembali ke Amerika", Trump mengatakan dalam pesan video singkat (Mehr News Agency, 2017). Setelah resmi dilantik, di hari pertama kerjanya pada tanggal 23 Januari 2017 Trump resmi menandatangani sebuah memorandum presiden mewakili Amerika Serikat untuk menarik diri dan menghentikan dukungan terhadap TPP, sesuai dengan rencana kampanye yang ia lakukan. Hal ini kemudian menjadi kebijakan luar negeri pertama yang dikeluarkan oleh Trump.

Dari penjelasan di atas sangat menarik bagi penulis untuk mengkaji latar belakang keputusan Donald Trump untuk menghentikan dukungan terhadap TPP, mengingat lebih dari enam tahun upaya negosiasi yang telah dilakukan oleh AS pada era Obama untuk memasukkan isu-isu dalam TPP *Agreement*, yang tentunya mengutamakan kepentingan AS secara keseluruhan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan pada latar belakang, maka penulis menarik pokok permasalahan yaitu, **“Mengapa Donald Trump menghentikan dukungan terhadap *Trans-Pacific Partnership* (TPP) pada tahun 2017?”**

C. Kerangka Pemikiran

Proses perubahan kebijakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam menarik diri dan menghentikan dukungan terhadap *Trans-Pacific Partnership* (TPP) tentu saja disebabkan oleh beberapa faktor yang salah satunya dapat dilihat melalui pendekatan mikro, yaitu pendekatan yang berfokus pada level

analisis individu sebagai pembuat kebijakan. Dalam hal ini, pembuat kebijakan adalah Presiden Amerika Serikat. Maka, untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah “**Mengapa Donald Trump menghentikan dukungan terhadap *Trans-Pacific Partnership* (TPP) pada tahun 2017?**” penulis akan menggunakan Teori Persepsi yang digunakan oleh aktor pembuat kebijakan.

Teori Persepsi

Teori persepsi Menurut Kenneth Boulding adalah sebuah teori di mana seseorang yang bereaksi terhadap dunia sekitarnya, sebenarnya ia sedang bereaksi terhadap citra dirinya tentang dunia. Sedangkan dunia nyata dan persepsi dirinya tentang dunia mungkin saja berbeda. Jadi, orang akan melakukan tindakan (bereaksi) berdasarkan pada apa yang mereka “*ketahui*”. Tanggapan seseorang pada suatu situasi juga tergantung pada bagaimana ia mendefinisikan situasi itu. Perbedaan dalam perilaku manusia ini berkaitan dengan perbedaan cara orang memandang “*kenyataan*” (Mas'ood, 1989).

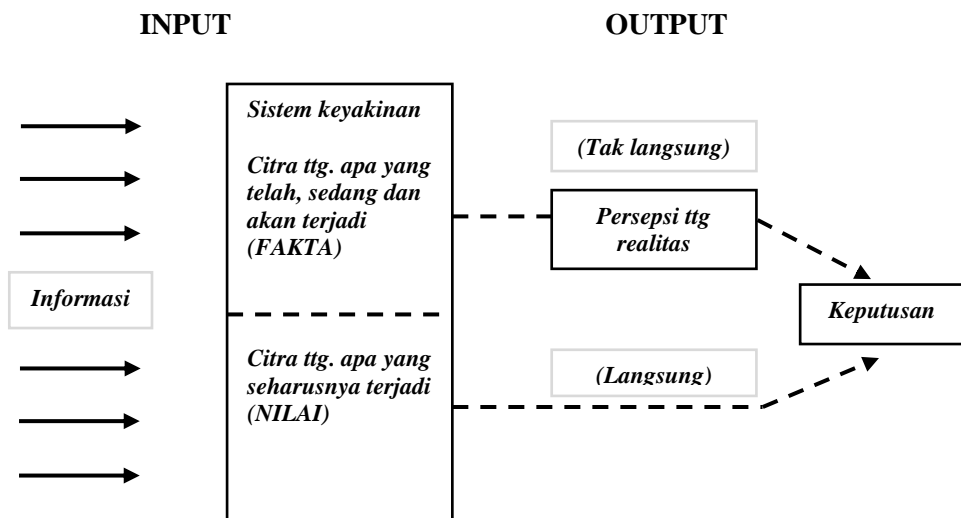
Mas'ood menyatakan bahwa persepsi adalah sistem keyakinan, citra atau model tentang dunia yang dianut oleh seseorang membantunya berorientasi terhadap lingkungan, mengorganisasikan persepsi sebagai penuntun tindakan, menentukan tujuan dan bertindak sebagai saringan dalam menyeleksi informasi dalam setiap situasi (Mas'ood, 1989). Hal ini yang menyebabkan persepsi para pembuat keputusan menempati posisi sentral dalam penentuan pembuatan keputusan dan seringkali menghasilkan keputusan yang berbeda.

Russett dan Starr dalam (Mas'ood, 1989) menjelaskan pula mengenai bagaimana hubungan antara citra, persepsi, dan perilaku internasional melalui tiga tahap. Pertama, adanya stimulus atau rangsangan dari lingkungan, yang disebut “*trigger event*” yang muncul untuk ditanggapi oleh para pembuat keputusan. Stimulus ditentukan dari apa yang dilihat dan apa yang diperhatikan. Kedua, adanya upaya mempersepsi stimulus itu. Pada tahap ini pembuat keputusan melakukan seleksi, menata, dan menilai informasi yang masuk. Ketiga, harus ada upaya

menafsirkan stimulus yang telah dipersepsi itu. Persepsi dan penafsiran itu sangat tergantung pada citra yang ada dalam benak si pembuat keputusan. Dalam hal ini terdapat dua jenis citra, yaitu terbuka dan tertutup. Citra yang terbuka menerima semua informasi yang baru, walaupun mungkin bertentangan dengan citra yang dipegang selama ini, dan menggabungkannya dengan citra yang telah dipegang itu, bahkan kalau perlu merubah citra yang sudah dianut agar cocok dengan kenyataan. Sedangkan citra yang tertutup menolak adanya perubahan sehingga mengabaikan informasi yang bertentangan dengan citra yang selama ini dipegang (Mas'oed, 1989).

Tahapan-tahapan yang telah dijabarkan oleh Russett dan Starr digambarkan oleh Ole R. Holsti dalam sebuah diagram mengenai hubungan persepsi, citra dan sistem keyakinan (*belief system*) dengan keputusan politik luar negeri. Diagram dapat dilihat pada Gambar 1.1:

Gambar 1. 1 Hubungan antara Sistem Keyakinan dengan Pembuatan Keputusan Politik Luar Negeri



Sumber: Ole R. Holsti, *“The Belief System and National Images: A Case Study”*, dalam Mohtar Mas’oed, *Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisis dan Teorisasi*, (Yogyakarta, 1989), hal.21.

Menurut Holsti, setiap orang hanya memperhatikan sebagian saja dari dunia sekitarnya, dan setiap orang memiliki serangkaian citra yang berbeda-beda untuk menginterpretasikan informasi yang masuk yang kemudian di persepsi melalui sistem keyakinan.

“Sistem keyakinan terdiri dari serangkaian citra yang membentuk keseluruhan angka acuan atau sudut pandang (universe) seseorang. Citra-citra itu meliputi realitas masalah, masakini, dan realitas yang diharapkan di masadepan dan preferensi nilai tentang apa yang ‘seharusnya terjadi’”

Jika melihat diagram di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada awalnya individu menerima berbagai informasi. Informasi yang diterima tersebut kemudian tersaring dalam

sistem keyakinan yang dianut. Sistem keyakinan sendiri terdiri dari fakta, yaitu citra tentang apa yang telah, sedang, dan akan terjadi, serta nilai, yaitu citra tentang apa yang seharusnya terjadi. Melalui fakta, individu kemudian memiliki persepsi tentang realitas, yang kemudian mendorongnya untuk mengambil keputusan. Adapun nilai berfungsi sebagai panduan langsung dalam mengambil keputusan. Dengan demikian, dalam melihat kebijakan luar negeri perlu untuk melihat bagaimana persepsi seorang individu pengambil keputusan yang dipengaruhi oleh sistem keyakinannya. Atau secara singkat, keputusan luar negeri dipengaruhi oleh persepsi dari aktor pengambil kebijakan mengenai fakta yang dilihat yang kemudian dikaitkan dengan nilai yang dianut (sistem keyakinan).

Pada kasus kebijakan Trump untuk menarik AS mundur dan menghentikan dukungan terhadap TPP juga dapat dianalisis melalui sistem keyakinan. Trump menangkap informasi melalui apa yang dilihat dan ia perhatikan, yaitu yang terletak pada salah satu tujuan utama dibentuknya TPP oleh 12 negara anggota di mana isinya berupa pengurangan atau penghapusan tarif (pajak) dan hambatan dalam perdagangan dan investasi. Hal tersebut juga sudah tercantum pada 30 pasal TPP yang telah dinegosiasikan selama lebih dari enam tahun ini. Tujuan dari perjanjian inilah yang kemudian menjadi *trigger* atau rangsangan yang akhirnya membuat Trump sebagai pemimpin dan pembuat kebijakan harus mengambil sebuah keputusan.

Pengurangan atau penghapusan tarif yang digunakan untuk mengurangi hambatan dalam perdagangan dan investasi ternyata berpotensi menimbulkan dampak berupa banyaknya pekerjaan *low-skill* di AS, yang kemudian dilimpahkan ke luar negeri karena pemerintah menghentikan perusahaan dengan menuntut untuk menurunkan biaya produksi. Hasilnya adalah banyaknya pekerja *low-skill* yang merupakan tulang punggung industri di AS kehilangan pekerjaan. Padahal jika diperhatikan, penurunan biaya produksi lebih relevan digunakan pada perusahaan-perusahaan yang ada di negara berkembang, karena negara berkembang dapat membayar pekerja dengan upah lebih rendah dibandingkan dengan para pekerja di AS. Akhirnya AS

harus berbagi pasar dengan negara-negara anggota TPP lainnya yang memiliki biaya produksi yang lebih rendah.

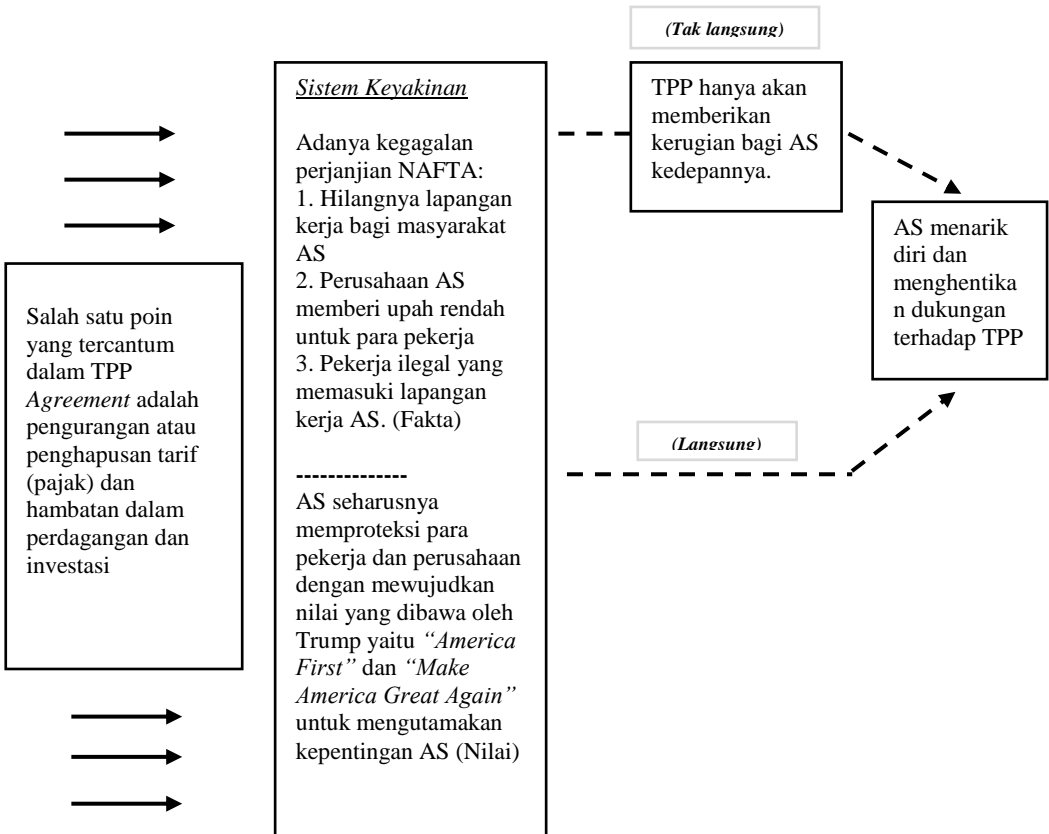
Hal serupa ternyata sudah pernah terjadi dalam perjanjian NAFTA (*North American Free Trade Agreement*) yang sudah berjalan dalam kurun waktu dua puluh tahun antara Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat. NAFTA menyebabkan hilangnya sekitar 700.000 pekerjaan saat produksi pindah ke Meksiko, NAFTA juga memperkuat kemampuan pengusaha AS untuk memaksa pekerja menerima upah dan tunjangan yang lebih rendah, serta membuka peluang bagi pekerja ilegal untuk masuk ke dalam lapangan kerja AS (Faux, 2013). Hilangnya pekerjaan yang begitu banyak dikarenakan perusahaan yang ada di Meksiko lebih mampu menurunkan biaya produksi dengan memberikan upah yang lebih rendah kepada para pekerjanya, dibandingkan perusahaan yang ada di AS.

Mengingat bahwa kedua negara yang tergabung dalam NAFTA juga merupakan mitra yang sama yang akan dihadapi oleh AS pada TPP *Agreement*, maka timbul nilai proteksionis yang dimiliki oleh Trump yang kemudian membentuk pandangan bahwa TPP hanya akan memberikan kerugian bagi AS jika tidak mampu melindungi para pekerja dan perusahaan milik AS untuk tidak kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Nilai proteksionis yang dibawa oleh Trump tercermin dalam slogan-slogan andalan yang ia gunakan sejak masa kampanye pemilihan presiden AS, seperti "*Make America Great Again (MAGA)*" dan "*America First*". Slogan-slogan ini digunakan sebagai wujud dari tindakan yang akan Trump lakukan dalam melindungi AS, terutama dalam persoalan ekonomi, perbatasan, ketertiban hukum, dan hubungan internasional yang menekankan pada kematangan internal AS. Serta digunakan sebagai identitas dan gambaran bahwa setiap kebijakan yang ia lakukan bertujuan untuk membuat AS bangkit kembali dari keterpurukan.

Berdasarkan informasi, fakta, dan nilai yang diproses dalam sistem keyakinan di atas maka terbentuklah sebuah persepsi Trump terhadap TPP bahwa TPP hanya akan memberikan kerugian bagi AS kedepannya, jika tidak mampu memproteksi ekonomi AS, terutama para pekerja dan perusahaan

AS. Persepsi yang telah terbentuk ini akhirnya menjadi pertimbangan bagi keputusan Trump untuk menarik diri dan menghentikan dukungan terhadap TPP pada tahun 2017. Berikut gambaran dari pengaplikasian teori persepsi Holsti terhadap kasus penghentian dukungan AS terhadap TPP:

Gambar 1. 2 Diagram Pengaplikasian Teori



D. Hipotesa

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik hipotesa bahwa alasan Donald Trump menarik diri dan menghentikan dukungan terhadap perjanjian dagang *Trans-Pacific Partnership* (TPP) karena Trump meyakini bahwa kedepannya TPP *Agreement* hanya akan memberikan kerugian bagi AS.

E. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Alasan Donald Trump Menghentikan Dukungan Terhadap *Trans-Pacific Partnership* (TPP) pada tahun 2017” terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh penulis diantaranya yaitu:

1. Mendeskripsikan lebih dalam mengenai tujuan dan manfaat dari pembentukan *Trans-Pacific Partnership* (TPP)
2. Memaparkan alasan dari keterlibatan Amerika Serikat dalam negosiasi *Trans-Pacific Partnership* (TPP) pada era sebelum kepemimpinan Donald Trump
3. Menganalisa mengenai faktor penyebab atau alasan di balik keputusan Donald Trump untuk menghentikan dukungan terhadap *Trans-Pacific Partnership* (TPP)

F. Jangkauan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan membatasi bahasan penelitian pada kajian mengenai perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada era pemerintahan Donald Trump terkait dengan dukungan Amerika Serikat terhadap *Trans-Pacific Partnership* (TPP) di awal pemerintahan Trump. Tidak menutup kemungkinan penulis juga akan mengulas tentang dukungan Amerika Serikat sebelum pemerintahan Donald Trump terhadap TPP untuk mengetahui alasan dan perubahan yang terjadi terkait dukungan Amerika Serikat terhadap TPP.

G. Metode Analisis dan Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian yang bersifat eksplanatif (menjelaskan) dan bertujuan untuk menemukan faktor apa yang melatarbelakangi peristiwa yang terjadi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan atau *library research* dan penggunaan data sekunder yang bersumber dari buku-buku, media cetak (koran, jurnal, dan lain-lain) serta internet (*website*) yang relevan dengan masalah yang diteliti. Pada tahap analisis, penulis menggunakan teknik analisis deduktif yang berangkat dari sebuah teori yang dilanjutkan dengan pencarian data di mana data tersebut kemudian dianalisa untuk dicari korelasinya dengan teori yang ada secara sistematis.

H. Sistematika Penulisan

Bab I merupakan bab pendahuluan yang akan berisi mengenai Latar Belakang Permasalahan, Pokok Permasalahan, Kerangka Pemikiran, Hipotesa, Tujuan Penelitian, Jangkauan Penelitian, Metode Penelitian, dan Rencana Sistematika Penelitian.

Dalam bab II akan dibahas mengenai hubungan yang dilakukan oleh AS dengan beberapa kerjasama perdagangan regional yang sudah berlaku. Hal ini sebagai pengantar dari pembahasan mengenai sejarah pembentukan TPP, yang dimulai sejak adanya inisiasi hingga pembentukan TPP. Bab ini juga berisi mengenai keterlibatan AS pada masa pemerintahan Barack Obama hingga proses negosiasi yang menghasilkan *TPP Agreement*.

Bab III membahas mengenai adanya kontroversi yang terjadi di dalam domestik AS yang akhirnya memicu Trump untuk merancang kebijakan dengan menarik keterlibatan AS dari TPP dan menghentikan dukungan, yang mana sudah dilakukan oleh Trump sejak masa kampanye hingga resmi dilantik menjadi Presiden AS.

Dalam bab IV akan dibahas mengenai alasan penghentian dukungan AS terhadap TPP pada masa kepemimpinan Trump. Pada awal bab juga akan dibahas mengenai proses pengambilan kebijakan luar negeri AS.

Bab V adalah bab akhir dalam penulisan penelitian ini yang berisi mengenai kesimpulan dari seluruh pembahasan.